

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan perubahan pada kondisi perbankan Indonesia, sehingga banyak bermunculan perbankan syariah. Pengaruh perbankan syariah memberi efek positif bagi lembaga keuangan lainnya, salah satunya adalah koperasi syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Di mana kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.¹

Secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggota mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.²

Koperasi di berbagai negara, seperti halnya di Indonesia, telah diterima dan digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam mencapai tujuan ekonomi. Hal ini dapat dilihat bahwa koperasi pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan karena pola kerjanya termasuk dalam ruang lingkup ekonomi.

¹Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang: *Standar Operasional Manajemen Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. 2007. Dalam : <http://depkop.go.id> (diakses, 15 September 2015)

²G. Karasapoertra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: 2001), hlm. 01

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia, yang lahir ratusan tahun silam. Dengan sifat kemandiriannya pondok pesantren mampu bertahan bahkan semakin tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mengakar kuat di masyarakat,³ dikatakan lembaga pendidikan tertua karena sebelum abad ke-16 sudah ada cikal bakal pesantren.

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia, pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli bentuk kebudayaan Indonesia.⁴

Bersama dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Industri keuangan syariah berkembang ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah di negeri ini, seperti perbankan, asuransi, dan BMT atau Perkoperasian.⁵ Munculnya banyak lembaga keuangan yang beredar berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena aktual yang menarik untuk dicermati.

Seiring dengan perkembangan praktik bisnis tersebut, maka diperlukan suatu perangkat yang dapat memperlancar proses dan transaksi

³Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: 1994), hlm. 07

⁴M. Dawam, Raharjo, *Pergulaan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta: Penghimpunan Pengembangan dan Masyarakat (P3M)), hlm. 268, (Diakses, 28 Agustus 2015)

⁵ *Ibid.*,

bisnis tersebut. Perangkat inilah yang disebut akuntansi. Arti penting akuntansi pada lembaga keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait.⁶ Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak berkepentingan untuk membuat suatu keputusan.

Akuntansi dapat diartikan suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, paling tidak sebagian di antaranya memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.⁷

Berdasarkan definisi di atas tampak seperti terbatas. Sebuah perspektif yang lebih luas dinyatakan dalam definisi yang menggambarkan akuntansi sebagai berikut: “Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian, informasi, ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut”.⁸

Laporan keuangan digunakan oleh para pengguna dengan masing-masing kepentingan. Pengguna laporan keuangan pada koperasi meliputi pemerintah, pengurus, manajer koperasi serta masyarakat. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawas dan pembinaan. Pengurus sebagai pelaksana untuk melancarkan kegiatan suatu keorganisasian. Manajer koperasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting untuk

⁶ *Ibid.*,

⁷ Ahmed Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hlm. 50

⁸ *Ibid.*,

membawa keberhasilan pada organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan koperasi sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri. Laporan keuangan tersebut menjadi sangat strategis, dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon anggota.

Di Indonesia prinsip akuntansi ini disusun dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). “Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya”.⁹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.¹⁰

Penerapan PSAK No. 101 yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

¹⁰ Dewan Standar Akuntansi Syariah, *Ikatan Akuntansi Indonesia*, (Jakarta, Graha Akuntan 2014), (Diakses, 30 April 2016).

laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.¹¹

Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi bahwa laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat.

Auditor-auditor independen diharapkan benar-benar bebas dari kepentingan-kepentingan para klien korporat mereka. Pekerjaan utama dari akuntan publik meliputi pelaksanaan jasa audit, akuntan, perpajakan, dan konsultan manajemen.

Jasa akuntan dan audit membantu dalam perancangan sistem pencatatan yang dapat diandalkan, memeriksa sistem secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, menyiapkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang akurat, dan memberikan sertifikasi atas keakuratan laporan keuangan.¹²

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, tidak tepat waktu dan kurang bermanfaat. Untuk meminimalkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang dinamai *Generally Accepted Accounting Principles* (GAPP).¹³ Di Indonesia GAAP yang berupa pernyataan-pernyataan tersebut dikondifikasikan dalam Standar

¹¹ Dewan standar akuntansi syariah, ikatan akuntansi Indonesia, (Jakarta, graham akuntan 2014), (diakses, 30 april 2016).

¹² Ahmed Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 50

¹³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 50

Akuntansi Keuangan (SAK). Standar tersebut berisi kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan.¹⁴ Koperasi pada pondok pesantren ini menggunakan PSAK No. 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah sebagai pembanding yang sudah di sahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.¹⁵ Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah berbadan hukum koperasi. Koperasi pada pondok pesantren al-Ittifaqiah dilihat dari laporan keuangan masih sangat sederhana atau tradisional, serta kurangnya pengetahuan bagi pengelola mengenai penyusunan laporan keuangan yang seharusnya dipakai, kurangnya informasi sehingga menggunakan metode sederhana dan kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja ahli bidang akuntansi. Dari penjelasan diatas akan saya jelaskan bagaimana laporan keuangan yang seharusnya dipakai oleh pihak koperasi pondok pesantren al-Ittifaqiah. Maka dari masalah di atas peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (PERIODE 2011-2013)”.

¹⁴ Muftiyah Afifah (2008), *Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Surya Amanah*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Semarang), (Diakses, 17 Agustus 2015)

¹⁵http://www.iaiglobal.or.id/v02/Prinsip_Akuntansi/Standar.php?cat=SAK%20Syariah&id=63 (Diakses, 2 Mei 2016)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan koperasi pesantren al-Ittifaqiah ?
2. Bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan koperasi pesantren al-Ittifaqiah berdasarkan PSAK No. 101?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren al-Ittifaqiah.
 - b. Untuk mengetahui apakah Penyajian Laporan Keuangan pada pondok pesantren al-Ittifaqiah telah sesuai dengan (PSAK) Persamaan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Analisis Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah:

- a. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi penyajian laporan keuangan pada pondok pesantren al-Ittifaqiah. Di samping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

- b. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbang pikiran laporan keuangan berikutnya khususnya bagi anggota perkoperasian pesantren maupun perkoperasian syariah lainnya.

D. TELAHAH PUSTAKA

Telaah pustaka penelitian mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut :

Muftiyas Afifah (2008), Mengkaji tentang “Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Surya Amanah” menyimpulkan laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK No. 27 tentang perkoperasian karena BMT berbadan hukum koperasi. Sehingga laporan keuangan BMT memuat neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan ditambah dengan laporan penggunaan dana ZIS yang tidak diatur dalam PSAK No. 27 penambahan tersebut dikarenakan BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.¹⁶

Ni Nyoman Pera Yati (2013), Mengkaji tentang “Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa “Citra Dana” Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Buku 31 Desember 2013 Berdasarkan SAK ETAP” menyimpulkan Penyajian laporan keuangan Koperasi Mahasiswa “Citra Dana” tahun 2013 telah sesuai dengan SAK ETAP, namun belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya laporan perubahan ekuitas yang memuat perubahan kekayaan bersih koperasi dari tahun 2012 ke 2013 serta catatan atas laporan keuangan.¹⁷

Ita Yuliana Setia Ningsih (2011), Mengkaji Tentang “Perlakuan Akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 Pada BMT al-Fath” menyimpulkan perlakuan akuntansi *mudharabah* pada BMT al-Fath yang

¹⁶Muftiyas Afifah (2008), *Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Surya Amanah*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), (Diakses, 16 September 2015)

¹⁷Ni Nyoman Pera Yati (2013), *Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa “Citra Dana” Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Buku 31 Desember 2013 Berdasarkan SAK ETAP*, Skripsi (Singaraja: Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia), (Diakses, 16 September 2015)

sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK No. 102.¹⁸

Nelly Nurilmi Oktavia (2010), Mengkaji Tentang “Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah”, menyimpulkan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Koperasi SP Syariah Ben-Iman Lamongan ini, sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuangan. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada pembiayaan *murabahahnya* karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa pinjaman kredit.¹⁹

Debora Intan Purba (2013), mengkaji tentang “Analisis Metode Pengakuan Pendapat Dan Beban Sesuai PSAK No. 27 Pada Koperasi Listrik”, menyimpulkan bahwa koperasi “Listrik” PT. PLN (persero) Wilayah Suluttenggo telah menerapkan PSAK No. 27 dengan baik. Salah satunya dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan menerapkan aturan standar akuntansi yang berlaku dalam PSAK No. 27 tentang perkoperasian. Neraca yang disajikan terdiri dari aktiva (asset), kewajiban dan ekuitas (kekayaan).²⁰

Suripto (2012), mengkaji tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 Pada KJKS/BMT Di Kabupaten Pemalang”, menyimpulkan perlakuan pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah* yaitu dengan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu serta *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati, telah sesuai dengan esensi akad *mudharabah* seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.²¹

Sri Luayyi (2015), mengkaji tentang “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK. No 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah ah-Rahmah Kabupaten Kediri”, menyimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem instan ar-Rahmah diketahui perhitungan yang dilakukan masih terdapat ketidaksamaan dalam

¹⁸Ita Yuliana Setia Ningsih (2011), *Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath*, skripsi (Jakarta: konsentrasi perbankan syariah program studi muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), (Diakses, 16 September 2015)

¹⁹Nelly Nurilmi Oktavia (2010), *Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah*, Skripsi (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya), (diakses, 16 September 2015)

²⁰Debora Intan Purba (2013), *Analisis Metode Pengakuan Pendapat Dan Beban Sesuai PSAK No. 27 Pada Koperasi Listrik*, skripsi (Manado: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado), (Diakses, 18 september 2015)

²¹Suripto (2012), *Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada KJKS/BMT Di Kabupaten Pemalang*, Skripsi (Pemalang: STIE as-Sholeh Pemalang), (Diakses, 18 September 2015)

perhitungan maupun dalam pembuatan jurnalnya. Sedangkan evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan PSAK No. 102, perhitungannya lebih sederhana dan akurat.²²

Dwi Hasmitha (2012), mengkaji tentang “Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”, menyimpulkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah menerapkan sistem pembiayaan *murabahah* yang operasionalnya telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.²³

Tri Wahyuningsih (2012), mengkaji tentang “Uji Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPRI Warga Jaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Tahun Buku 2012”, menyimpulkan perhitungan penyusutan yang secara langsung dipersetahunkan tidak dari tanggal peroleh.²⁴

Arum Puspita Sari (2014), mengkaji tentang “Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Trubus Alami)”, menyimpulkan dari semua siklus akuntansi (transaksi sampai dengan neraca saldo setelah penutupan), Perusahaan Rokok Trubus Alami hanya menerapkan sebagian, yaitu dari transaksi hingga pembuatan neraca dan laporan laba rugi.²⁵

²²Sri Luayyi (2015), *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK. No 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah ah-Rahmah Kabupaten Kediri*, Skripsi (Kediri: Kabupaten Kediri), (Diakses, 18 September 2015)

²³Dwi Hasmitha (2012), *Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*, Skripsi (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara), (Diakses, 18 September 2015)

²⁴Tri Wahyuningsih (2012), *Uji Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPRI Warga Jaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public Pada Tahun Buku 2012*, skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang), (Diakses, 19 September 2015)

²⁵Arum Puspita Sari (2014), *Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Trubus Alami)*, Skripsi (Brawijaya: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya), (Diakses, 19 September 2015)

No.	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Muftiyas Afifah (2008)	Penelitian ini membahas tentang pencatatan dan penyajian akuntansinya memuat perbedaan antara PSAK 27 dan PSAK 59 sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menyesuaikan PSAK yang diterapkan pada Pondok Pesantren al-Ittifaqiah dengan PSAK yang sudah ditentukan yaitu PSAK no.27.	Peneliti ini meneliti tentang analisis laporan keuangan syariah pada koperasi atau BMT.
2.	Ni Nyoman Pera Yati (2013)	Penelitian ini membahas tentang kelemahan dan menyarankan perbaikan dalam penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK.	Penelitian ini meneliti tentang PSAK yang kuat mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan begitu pula sebaliknya penelitian yang peneliti lakukan.
3.	Ita Yuliana Setia Ningsih (2011)	Penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> berdasarkan PSAK 102 sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang PSAK No. 27.	Penelitian ini menggunakan PSAK yang sudah sama-sama disahkan sesuai dengan berjalannya waktu.
4.	Nelly Nurilmi Oktavia (2010),	Penelitian ini membahas tentang penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan untuk pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan penelitian yang penulis menggunakan analisis penyajian laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 27.	Penelitian ini mengacu pada PSAK yang sama-sama disahkan sesuai dengan berjalannya waktu.
5.	Debora Intan Purba (2013)	Penelitian ini lebih membahas mengenai	Penelitian ini menggunakan laporan keuangan koperasi

		metode pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK No. 27 pada koperasi listrik, sedangkan penelitian yang penulis tentang penyajian laporan keuangan pada Pondok Pesantren al-Ittifaqiah sesuai dengan PSAK No. 27.	yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, begitu pula sebaliknya penelitian yang peneliti lakukan.
6.	Suripto (2012),	Penelitian ini membahas tentang PSAK No. 105 tentang akuntansi <i>mudharabah</i> dinyatakan bahwa tujuan PSAK No. 105 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi <i>mudharabah</i> (akuntan <i>mudharabah</i>), sedangkan penelitian penulis menggunakan PSAK No. 27.	Penelitian ini menggunakan PSAK yang telah disahkan yang mempunyai 3P yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, begitu juga penelitian yang penulis lakukan.
7.	Sri Luayyi (2015)	Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis menggunakan PSAK No. 102 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> , sedangkan penelitian ini penulis memakai analisis kualitatif yang mengacu pada PSAK No. 27.	Dari kedua penelitian ini lebih mengacu pada PSAK yang telah ditetapkan.
8.	Dwi Hasmitha (2012)	Penelitian ini menggunakan PSAK No. 102 sedangkan penelitian bagi penulis memakai PSAK No. 27.	Dari kedua penelitian ini lebih mengacu pada PSAK syariah yang telah disahkan.
9.	Tri Wahyuningsih (2012)	Penelitian ini berdasarkan laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP, penelitian bagi penulis menggunakan PSAK No. 27.	Penelitian ini menggunakan elemen neraca dan laporan arus kas yang digunakan oleh penelitian penulis gunakan.

10.	Arum Puspita Sari (2014)	Penelitian ini menganalisis bagaimana kondisi penyusunan laporan keuangan pada Perusahaan Rokok Trubus Alami, penelitian bagi penulis melihat perkembangan dari beberapa tahun pada koperasi pondok pesantren.	Penelitian ini menggunakan elemen neraca dan laporan arus kas yang digunakan oleh penelitian penulis gunakan.
-----	--------------------------	--	---

Sumber : Penelitian hlm. 08-10

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap skripsi-skripsi sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan judul penelitian “*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Pada Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Periode 2011-2013)*”. Di sini penulis mempertegas bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah bertujuan untuk melihat apakah koperasi pada Pondok Pesantren al-Ittifaqiah sesuai dengan PSAK yang telah ditetapkan yaitu PSAK No. 101.

E. KERANGKA TEORI

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan laba/rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan²⁶

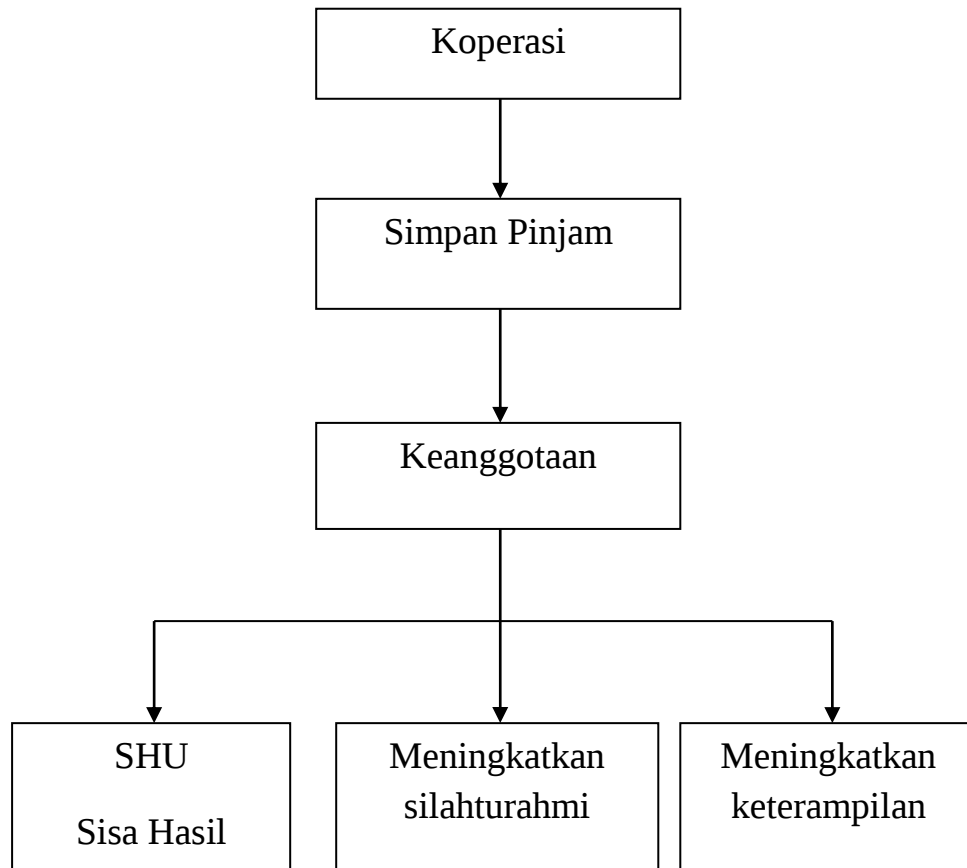
Laporan keuangan pokok koperasi pada Pondok Pesantren al-Ittifaqiah meliputi:

1. Neraca
2. Perhitungan hasil usaha
3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas²⁷

²⁶Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Graham Akuntan 2014), (Diakses, 30 April 2016)

²⁷ Dokumentasi, *Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 01-04

Gambar 1.1²⁸
Kerangka berfikir



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penyajian laporan keuangan koperasi. Dilihat dari informasi datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak dapat diuji dengan statistik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta

²⁸ Wawancara dengan Staf Bagian Koperasi Ibu Reska (26 agustus 2015)

menjelaskan laporan keuangan koperasi. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan pada Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah.²⁹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan atas sifat-sifat masalah penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian komparatif yaitu penelitian yang menyelidiki sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada. Penelitian ini membandingkan antara obyek yang diteliti dengan konsep pembandingnya. Konsep pembanding yaitu teori-teori dalam standar akuntansi keuangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan.³⁰

b. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer adalah data yang penulis ambil langsung dari penelitian lapangan dengan hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara (*interview*) langsung terhadap staf bagian keuangan maupun

²⁹ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: 2006), hlm. 140

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 38

bagian manajer yang berada pada koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah.

- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah dan beberapa referensi lain seperti buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan bahasan yang dikerjakan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan atau dokumen, dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan, dilakukan pada koperasi dengan melalui:³¹
 - 1) *Interview*/wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).³²

Interview yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah staf yang berwenang di koperasi pondok pesantren al-Ittifaqiah.

³¹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 43

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 35

2) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³³ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan. Di mana laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh koperasi pondok pesantren al-Ittifaqiah meliputi neraca dan laporan perhitungan hasil usaha.

5. Teknik Analisis

Alat analisis yang akan penyusun gunakan adalah analisis komparatif yaitu dengan cara membandingkan obyek penelitian dengan konsep perbandingan. Obyek penelitian adalah neraca dan laporan perhitungan hasil usaha koperasi, sedangkan perbandingan yang diacu adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Data yang akan dianalisis oleh penyusun yaitu analisis komparatif penerapan laporan keuangan koperasi terhadap penerapan laporan keuangan pada PSAK No. 101.

³³Muhammad, "Penelitian Ekonomi Islam" dalam *skripsi*, Awaliyah, *Analisis Implementasi Syariah Marketing di BMT Insan Mulia Palembang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)*, (Palembang: Fakultas FEBI UIN Raden Fatah Palembang, 2008), hlm. 14. (tidak diterbitkan)

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dikembangkan ke dalam lima bab. Untuk mempermudah pembahasan setiap bab, maka dibuat intisari dari tiap bab. Pemisahan dari ke lima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan membuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengurai secara teoritis tentang laporan keuangan mulai dari pengertian laporan keuangan yang kemudian akan diketahui tujuan laporan keuangan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Berisi *setting* tempat penelitian, deskripsi obyek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis, dan lain-lain.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN

Menganalisis data lalu menginterpretasikan menjadi sebuah makna yang bisa menjadi bahan untuk menyimpulkan dari penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN

Menyimpulkan apa yang terjadi setelah penelitian ini apakah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan serta memberi masukan kepada berbagai pihak yang bersangkutan bahwa penelitian ini masih terus harus dikembangkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. DEFINISI LAPORAN KEUANGAN

Komite istilah “*American Accounting Association*” mendefinisikan akuntansi sebagai:

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”³⁴

Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni:

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

³⁴ Soemarso S.R., *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 02

Tujuan akuntansi utama adalah menyajikan informasi ekonomi “*economic information*” dari suatu kesatuan ekonomi “*economic entity*” kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³⁵

Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi:

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.³⁶

Badan lain seperti “*Accounting Principle Board*” (APB) *statement* nomor 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan”.³⁷

Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.³⁸

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Soemarso S.R., *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 03

³⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 02

³⁸ K.R Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai presentasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.³⁹

Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan (*users*), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data dasar transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntan hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.⁴⁰

Laporan keuangan koperasi adalah bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan.⁴¹

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Febuari 2012), hlm. 03.

⁴¹ Tuti Trisnawani, *Akuntansi Untuk Koperasi Dan UKM*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 24.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

APB *Statement* nomor 4 (tahun 1970) yang berjudul “*Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises*”, akuntansi adalah:

“Sebuah aktivitas jasa, di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada)”.

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai:

“Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”.⁴²

Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas utama yang harus dipenuhi informasi akuntansi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan adalah relevan dan andal. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan yaitu dengan membantu pemakai informasi membuat prediksi berdasarkan hasil yang telah dicapai di masa lalu, keadaan pada masa kini dan kejadian-kejadian di masa depan atau untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki harapan-harapan sebelumnya. Informasi yang andal

⁴² *Ibid.*,

adalah informasi yang secara rasional bebas dari kesalahan dan biasanya secara jujur menyajikan apa yang seharusnya disajikan.⁴³

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.⁴⁴

Berdasarkan Persamaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan

⁴³Mamduh M Hanafi Dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jokjakarta: 2003), hlm. 24

⁴⁴*Ibid*,.

ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.⁴⁵

Menurut APB Statement No. 4 berjudul *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises*. Dan laporan ini banyak memenuhi studi-studi tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut:

A. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP (*generally accepted accounting principles*).

B. Tujuan Kualitatif.

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statement No. 4 adalah sebagai berikut:

- a. *Relevance*, memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Understandability*, informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.
- c. *Verifiability*, hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.
- d. *Neutrally*, laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. *Timeliness*, laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
- f. *Comparability*, informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
- g. *Completeness*, informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari pada pemakai.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

C. LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 101

Penyajian laporan keuangan yang disajikan menggunakan PSAK No. 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah, elemennya sebagai berikut:⁴⁷

1. Neraca

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan sebagian unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Aset keuangan
- c. Piutang usaha dan piutang lainnya
- d. Persediaan
- e. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- f. Aset tetap
- g. Aset tak berwujud
- h. Hutang usaha dan hutang lainnya
- i. Hutang pajak
- j. Dana syirkah temporer
- k. Hak minoritas
- l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya

⁴⁷ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Ikatan Akuntansi Indonesia*, (Jakarta: Jalan Sindanglaya 2009), (Diakses, 30 April 2016)

Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh pernyataan standat akuntansi keuangan atau apabila keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.⁴⁸

2. Laporan laba/rugi

Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Pendapatan usaha
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana
- c. Beban usaha
- d. Laba atau rugi usaha
- e. Pendapatan dan beban non usaha
- f. Laba atau rugi dari aktivitas normal
- g. Beban pajak
- h. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila disajikan oleh pernyataan standat akuntansi

⁴⁸ *Ibid.*,

keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.⁴⁹

3. Laporan perubahan ekuitas

Perubhaan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan periode pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham. Seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode bersangkutan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait.

5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan

⁴⁹ *Ibid.*,

haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.⁵⁰

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - 1) Infak
 - 2) Sedekah
 - 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - 4) Pengembalian dana kebajikan produktif
 - 5) Denda
 - 6) Pendapatan nonhalal
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - 1) Dana kebajikan produktif
 - 2) Sumbangan

⁵⁰ *Ibid.*,

3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum

- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- d. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
- e. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.⁵¹

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau ringkasan jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.⁵²

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 101

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai harta (aktiva), kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Persamaan akuntansinya sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Investasi Tidak Terikat} + \text{Ekuitas}$$

Neraca menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.⁵³

Secara keseluruhan neraca pada PSAK No. 101 diilustrasikan sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Jalan Sindalaya 2009), (Diakses, 30 April 2016)

⁵⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Graham Akuntan 2014), (Diakses, 30 April 2016)

Gambar 2.1
NERACA

Per 31 Desember 20XX

Aset	xxx	Kewajiban	xxx
Kas	xxx	Kewajiban segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada Bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari Bsnk lsin	xxx
Piutang:		Utang:	
Murabahah	xxx	Salam	xxx
Istishna'	xxx	Istishna'	xxx
Ijarah xxx		Kewajiban kepada Bank lain	xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	xxx
Aset ijarah	xxx		
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	Dana Syirkah Temporer	
Piutang salam	xxx	Dana syirkah temporer dari	
Investasi pada entitas lain	xxx	bukan bank:	
Aset tetap	xxx	Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx
		Dana syirkah temporer dari	
		bank:	
		Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx
		Musyarakah	
		Jumlah	
		Ekuitas	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambahan modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif	
		lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan nonpengendali	xxx
		Jumlah	xxx
		Jumlah Kewajiban,	
		Dana Syirkah Temporer, dan	
Jumlah Aset	xxx	Ekuitas	xxx

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban, yang hasil akhirnya menggambarkan keuntungan atau kerugian. Dimana definisi pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam kewajiban atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan seperti manajemen rekening investasi terbatas.

Sedangkan pengertian dari beban adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan atau aktivitas termasuk pemberian jasa.⁵⁵

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai Selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMK YKPN, 2002), hlm. 292

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 293

Laporan laba rugi berdasarkan PSAK No. 101 adalah sebagai berikut:⁵⁷

Gambar 2.2
Laporan Laba Rugi

Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX

Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna' paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik Bank	xxx
Pendapatan Usaha Lain	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
Laba Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Penghasilan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah	xxx

⁵⁷ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Graham Akuntan 2014), (Diakses, 30 April 2016)

Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)
Penghasilan Neto	xxx
Penghasilan neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendalian	xxx

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menunjukkan:⁵⁸

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan

⁵⁸ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Jalan Sindalaya 2009), (Diakses, 30 April 2016)

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas diuraikan menjadi tiga bagian:⁵⁹

- a. Arus kas dari aktivitas operasi
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat berdasarkan PSAK No. 101:⁶⁰

Gambar 2.3
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Periode yang Berakhir pada 31 Desember 20XX

Sumber Dana Zakat	
Zakat dari internal Bank Syariah	xxx
Zakat dari eksternal Bank Syariah	xxx
Jumlah	xxx
Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelolaan Zakat	(xxx)
Kenaikan	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

⁵⁹ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Jalan Sindalaya 2009), (Diakses, 30 April 2016)

⁶⁰ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Graham Akuntan 2014), (Diakses, 30 April 2016)

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101:⁶¹

Gambar 2.4
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Periode yang Berakhir pada 31 Desember 20XX

Sumber Dana Kebajikan	
Infak dari Bank Syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xx
Jumlah	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah	(xxx)
Kenaikan	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx

⁶¹ Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Graham Akuntan 2014), (Diakses, 30 April 2016)

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: ⁶²

- a. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- c. informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar

D. LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Pemakai laporan keuangan pada koperasi terdiri dari berbagai laporan masyarakat yang berbeda kemampuan dalam menginterpretasikan dan menganalisis informasi keuangan yang disajikan kepada mereka. Berdasarkan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, laporan keuangannya meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, Laporan promosi ekonomi, laporan arus kas.

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

⁶² Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, (Jakarta: Jalan Sindalaya 2009), (Diakses, 30 April 2016)

a. Harta

Harta atau aktiva adalah barang-barang atau benda-benda berharga dan hak-hak yang dimiliki sesuatu perusahaan/koperasi, misalnya: uang, tagihan-tagihan atau piutang-piutang, barang-barang dagangan/persediaan/*inventory*, tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain.

b. Utang

Utang atau pasiva adalah jumlah yang harus dibayar dan terdiri dari utang/pinjaman, wesel bayar, hipotek, upah yang masih harus dibayar, pajak yang masih harus dibayar dan lain-lain.

c. Modal

Modal perusahaan/koperasi adalah kelebihan jumlah harta terhadap jumlah utang dari perusahaan atau koperasi.⁶³

2. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.
3. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
4. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:
 - a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama,
 - b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama,
 - c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi,
 - d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
5. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:
 - a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
 - 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - 2) Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
 - 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
 - b. Pengungkapan informasi lain antara lain:

⁶³Rivai Wirasasmita Dan Ani Kenangasari, *Analisis Laporan Keuangan Koperasi*, (Bandung: 1999), hlm. 12

- 1) Asset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 2) Asset yang diperoleh secara *hibah* dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- 4) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- 5) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.⁶⁴

Manajemen koperasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan dalam hal ini, tidaklah berarti bahwa semua informasi usaha, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan koperasi dapat diungkapkan secara bebas. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pengurus koperasi. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari sistem pelaporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi.

⁶⁴ *Ibid.*,

Penggunaan utama (*main users*) dari laporan keuangan koperasi adalah:

1. Para anggota koperasi,
2. Pejabat koperasi,
3. Calon anggota koperasi,
4. Bank,
5. Kreditur dan,
6. Kantor pajak.⁶⁵

Laporan keuangan koperasi mempunyai karakter tersendiri sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan (RAT).
- b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
- c. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi (UU No.25/1992, Pasal 36, Ayat 1).
- d. Laporan laba-rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU). SHU koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. SHU yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
- e. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART (anggaran rumah tangga) koperasi. SHU yang berasal dari transaksi anggota dibagi sebagai berikut:
 - 1) Dana cadangan
 - 2) Dana anggota
 - 3) Dana pengurus
 - 4) Dana pegawai/karyawan
 - 5) Dana sosial
 - 6) Dana pembangunan daerah kerja

SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Dana cadangan koperasi

⁶⁵ Arifin Sitio Dan Halomoan Tamba, *KOPERASI Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), hlm. 107

- 2) Dana pengurus
- 3) Dana pegawai/karyawan
- 4) Dana pendidikan koperasi

Komponen-komponen tersebut selama belum dicairkan, disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca.

- f. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari:
 - 1) Simpanan-simpanan
 - 2) Pinjaman-pinjaman
 - 3) Penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.

Simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.⁶⁶

E. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, namun tujuan koperasi yang utama bukanlah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di Negara Pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan. Akan tetapi justru harus melakukan kerja sama dengan siapa pun dan dengan pihak mana pun juga. Seperti yang telah berulang-ulang kali diuraikan dan tegaskan;

“Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Dengan kata lain dapat dan sering pula dikatakan bahwa: “maksud dan tujuan koperasi ialah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasar kekeluargaan dan kegotongroyongan”. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 109

⁶⁷ Sagimun, *Koperasi*, (Jakarta: Raji Masagung, 1989), hlm. 32

Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan koperasi sedapat mungkin memisahkan antara aktivitas yang dilakukan anggota dan bukan anggota, dan tujuannya:

1. Laporan keuangan bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk:
 - a. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
 - b. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
 - c. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
 - d. Mengetahui transaksi, kejadian, dan kekayaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
 - e. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*,

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH

Salah satu lembaga keuangan non bank yang berbentuk koperasi yang berkembang saat ini yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Koperasi adalah suatu istilah, nama, sebutan, bahasa khusus dalam bidang perekonomian yang berarti koperasi merupakan sebutan bagi wadah kerja sama ekonomi yang berwatak sosial, guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.⁶⁹

Koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.⁷⁰ Dana yang ada akan digunakan untuk memenuhi usaha yang telah ada, dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang mengikuti koperasi dapat membuat usaha yang dijalankan oleh koperasi menjadi berkembang. Penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan, sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh koperasi pada Pondok Pesantren al-Ittifaqiah.

⁶⁹Seri Pustaka Kopindo, *Apakah Koperasi Itu*, (Jakarta: PT Karya Uni Press, 1982), hlm. 01

⁷⁰*Ibid.*,

A. SEJARAH BERDIRI DAN PERKEMBANGAN KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH

Koperasi ini dapat terbentuk dengan adanya kemauan untuk berinisiatif mengangkat usaha riil masyarakat melalui lembaga keuangan. Bermodal niat dan keyakinan yang kuat dan mengumpulkan generasi yang ingin mengikuti keuangan koperasi yang akan dibentuk, yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi ini didirikan dengan badan hukum nomor: 04/BH/KDK.6.2/XI/1998 tanggal 10 November 1998 dan mengalami perubahan nomor: 018/SK/BH/PAD/INDAGKOP/I/2006 pada bulan Januari 2006 dan terdaftar di kantor pelayanan pajak di Kayu Agung dengan nomor NPWP.07.542.819.4.312.000, maka diputuskanlah nama dari Lembaga Keuangan Koperasi pada Pondok Pesantren al-Ittifaqiah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas koperasi pondok pesantren al-Ittifaqiah Indralaya melakukan usaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Unit usaha simpan pinjam,
2. Unit usaha peternakan sapi,
3. Unit usaha pertanian,
4. Unit usaha waserda,
5. Unit usaha lainnya.⁷¹

Keanggotaan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya terhitung per 31 desember 2012 terdiri dari para peternak, petani peserta kebun di lingkungan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya yang berjumlah 137 orang anggota. Dengan susunan pengurus Koperasi

⁷¹ *Dokumentasi*, 23 September 2005

Pondok Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir periode 31 desember 2012 s/d 2015 adalah sebagai berikut:⁷²

1. Ketua : Drs. H. Syamsul Bahri HAR.
2. Sekretaris : H.M. Joni Rusli, S.PD.I.
3. Bendahara : Drs. M. Rosyad Yusuf, SH.

B. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH

Dalam organisasi diperlukan adanya pembagian kerja yang logis. Untuk itu disusun struktur organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik maka akan mendukung keberhasilan perusahaan karena perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Maka disusun struktur kepengurusan sebagai berikut:

⁷²Dokumentasi, 23 September 2005

RAT, merupakan rapat pemegang saham sebagai forum tertinggi untuk memutuskan segala kebijakan yang berkenaan dengan kemajuan koperasi. Pengurus mewakili pemegang saham yang mengawasi dan mengarahkan pengelolaan koperasi.

Adapun pengurus Kopontren al-Ittifaqiah:

1. Ketua : Drs. H. Syamsul Bahri HAR.
2. Sekretaris : H.M. Joni Rusli, S.PD.I.
3. Bendahara : Drs. M. Rosyad Yusuf, SH.

Badan pengawas adalah suatu badan yang terdiri orang-orang ahli dalam hukum Islam yang sengaja dibentuk untuk mengawasi operasi analisis produk koperasi.

1. Ketua BP : H. M. Natsir Agus, BA.
2. Anggota I : Drs. Ismail M. Jelas.
3. Anggota II : Drs. M. Rosyad Yusuf, SH.

Untuk mengelola usaha Koperasi Pondok Pesatren al-Ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pengurus menyerahkan pengelolaan manajemen kepada ketua dan dibantu oleh karyawan/karyawati sebagai berikut:

1. Unit simpan pinjam : Hesti Widiastuti, S.Pd.I.
2. Unit Waserda : Huzairin.
3. Unit Pertanian
 - a. Peternakan dan perkebunan
 - 1) Jimi Ismail, S. Pd. I.
 - 2) Abdul Khair.

- 3) Amar Tajudin.
- b. Perikanan
 - 1) Syahrudin
 - 2) Sukirman
- 4. Unit Industri Kerajinan dan Keterampilan
 - a. Khotmir Roni, S. Pd. I.
 - b. Titi. S Ningrum.
 - c. Aman Sudianto, S. Pd. I.⁷³

C. VISI DAN MISI KOPONTREN AL-ITTIFAQIAH

Secara spesifik, Kopontren al-Ittifaqiah mempunyai visi:

“Ingin menjadi Lembaga Keuangan yang mandiri, terpercaya, professional, dan membawa manfaat bagi semua orang”.

Untuk meraih visi tersebut, Kopontren al-Ittifaqiah mempunyai misi:

1. Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
2. Melakukan sosialisasi bersama anggota dalam pengelolaan dana koperasi.
3. Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan koperasi secara komprehensif dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Memberikan sarana yang aman dan nyaman bagi masyarakat penggunaan produk dan jasa dari koperasi.⁷⁴

⁷³ Dokumentasi, *Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 02

⁷⁴ Dokumentasi, 23 September 2005

D. PRODUK DAN JASA KOPONTREN AL-ITTIFAQIAH

Lembaga keuangan Kopontren al-Ittifaqiah memiliki tujuan membangun dan memberdayakan ekonomi umat untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Kopontren al-Ittifaqiah Indralaya melakukan usaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Unit usaha simpan pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan usaha yang dibuka dengan alasan untuk menabung yang dapat dikelola untuk usaha dan anggota dapat memakainya dengan keperluan. Unit usaha simpan pinjam di dalam perkoperasian terdiri dari:⁷⁵

a. Simpanan pokok

Undang-undang Koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 1, bahwa: “simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi”. Dijelaskan dalam memori penjelasannya, pasal 33 ayat (2), bahwa: “simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota”.

⁷⁵Hadiwidjaja Dan Rivai Wirasasmita, *Modal Koperasi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2001), hlm. 09

Atas dasar pengertian di atas, maka simpanan pokok dalam koperasi merupakan setoran anggotanya yang masing-masing sama banyaknya, secara langsung memberikan ciri seseorang atau Badan Hukum Koperasi telah menjadi anggota koperasi, dan simpanan pokok merupakan simpanan permanen anggota, atau modal permanen koperasi.

b. Simpanan wajib

Dalam pembahasan ini penulis mendapatkan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang no. 12 tahun 1967, yang menyatakan dalam bab IX, pasal 33 ayat (2), “ simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi”.

Simpanan wajib ini, tidaklah merupakan modal permanen daripada koperasi. Undang-undang koperasi memberikan petunjuk untuk diatur oleh koperasi sendiri, baik dalam anggaran dasarnya maupun dalam anggaran rumah tangganya, simpanan wajib itu dapat diambil kembali, setelah jangka waktu yang ditentukannya habis, kendati seseorang atau badan hukum koperasi masih menjadi anggota koperasi yang bersangkutan.

Terlepas dari jangka waktu simpanan wajib itu diperjanjikan oleh koperasi dan anggotanya, berapa lama simpanan itu harus/akan

berada dalam koperasi, mengingat ia ditentukan dapat diambil kembali selama seseorang/suatu badan hukum koperasi menjadi anggota, maka simpanan wajib itu ditinjau dari tubuh organisasi intern koperasi; pada hakikinya merupakan kewajiban atau utang koperasi.

c. Simpanan Sukarela

Berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1967, Tentang perkoperasian. Bab IX, pasal 32 ayat (2) menempatkan simpanan anggota dalam huruf (a). sedangkan dalam ayat (3) dinyatakan: “simpanan sukarela dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota”. Simpanan sukarela dalam koperasi merupakan kewajiban atau utang koperasi yang secara hati-hati perlu dianggap sebagai utang jangka pendek.

2. Unit Usaha Peternakan, Perkebunan, Pertanian Dan Perikanan

Merupakan usaha yang dilakukan secara swasembada yang berarti kemampuan sendiri, sembada yaitu teman yang seikatan.

Dalam swasembada terkandung pengertian mendahulukan tolong-menolong antara teman seikatan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam melakukan kerjasama kegiatan dalam unit usaha tersebut.⁷⁶

Pondok Pesantren al-Ittifaqiah (PPI) juga memiliki sumber daya alam yang lebih dari cukup untuk dikembangkan dalam bidang pertanian tanaman

⁷⁶ *Ibid.*,

pangan, perkebunan kelapa sawit maupun karet, peternakan sapi dan perikanan. Dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya alam didukung sumber daya manusia yang dimiliki tersebut, Pondok Pesantren al-Ittifaqiah mempunyai peluang yang sangat strategis kondusif dan prospektif dalam pengembangan Usaha Agribisnis Terpadu dengan payung Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah.⁷⁷

3. Unit usaha waserda

Unit usaha warung serba ada (waserda) pada koperasi sudah merupakan usaha sampingan dan berada di bawah Unit Simpan Pinjam (USP). Unit waserda ditujukan sebagai unit usaha pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggota koperasi itu sendiri, akan tetapi pada perkembangannya waserda selain memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggota koperasi, juga bisa melayani masyarakat umum di sekitar koperasi itu berada.

Tujuan kegiatan usaha waserda:

- a. Untuk meningkatkan volume kegiatan warung serba ada (waserda)
- b. Mengembangkan warung serba ada (waserda) menjadi waserda moderen⁷⁸

⁷⁷ Dokumentasi, *Profil Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 01

⁷⁸ Dokumentasi, *Profil Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 04

BAB IV

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPONTREN AL-ITTIFAQIAH

A. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH

Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren disusun atas dasar *cash basis*. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode berjalan. Diterapkannya metode *cash basis* karena metode inilah yang lebih sesuai dengan karakteristik bagi hasil.

1. Neraca

Neraca Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva pada neraca dibagi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Secara keseluruhan neraca diilustrasikan sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹Dokumentasi, *Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 01

Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah

Gambar 4.1

NERACA

Per 31 desember 2011 dan 2012

Aset	CTT	2012	2011
Aset Lancar			
Kas Setara Kas	4	110.662.655,37	38.736.958,37
Piutang Anggota	5	314.191.000,00	196.117.500,00
Persediaan Barang	6	341.997.027,00	355.701.127,00
Jumlah		766.850.682,37	590.555.585,37
Aset Tetap			
Bangunan Kantor	7	48.000.000,00	48.000.000,00
Peralatan Kantor	8	17.750.000,00	16.250.000,00
Akumulasi Pyst. Aset Tetap	9	(6.837.500,00)	-
Jumlah		58.912.500,00	64.250.000,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		58.912.500,00	64.250.000,00
Jumlah Aset		825.763.182,37	654.805.585,37
Kewajiban dan Ekuitas	CTT	2012	2011
Kewajiban Lancar			
Hutang Usaha	10	189.361.835,37	149.361.835,37
Simpanan Sukarela	11	1.139.847,00	-
Dana-Dana SHU	12	4.232.500,00	4.318.500,00
Jumlah		194.734.182,37	153.680.335,37
Kewajiban Jangka Panjang			
Hutang Dana Bergulir	13	350.000.000,00	350.000.000,00
Hutang BMI/AL Falah	14	40.000.000,00	-
Jumlah		390.000.000,00	350.000.000,00
Ekuitas			
Simpanan Pokok	15	3.880.000,00	3.280.000,00
Simpanan Wajib	16	106.017.000,00	37.436.000,00
Cadangan Koperasi	17	97.350.000,00	88.976.500,00
SHU Tahun Berjalan	18	33.782.000,00	21.432.750,00
Jumlah		241.029.000,00	151.125.250,00
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas		825.763.182,37	654.805.585,37

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang dalam penelitian ini perusahaan dimaksud adalah Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung dalam laporan keuangan. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui gambaran tentang posisi keuangannya. Laporan keuangan yang membahas neraca pada Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah terdiri dari aktiva (aset), pasiva (kewajiban) dan ekuitas (kekayaan bersih). Di mana aktiva memuat aktiva lancar dan aktiva tetap. Pos-pos dalam aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Sedangkan aktiva tetap terdiri dari bangunan, peralatan, dan akumulasi penyusutan.

Pasiva dalam neraca Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah terdiri dari pasiva (kewajiban) dan ekuitas. Pos-pos dalam kewajiban jangka pendek antara lain bagi hasil untuk produk simpanan, hutang usaha dan dana-dana SHU. Kewajiban jangka panjang terdiri dari hutang. Sedangkan ekuitas terdiri dari simpanan, cadangan dan SHU tahun berjalan.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban. Akun-akun yang termasuk dalam laporan perhitungan usaha adalah (periode 2011-2013):⁸⁰

⁸⁰Dokumentasi, *Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 02

Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah

Gambar 4.2

Perhitungan Hasil Usaha

Per 31 Desember 2011 dan 2012

Uraian	CTT	2012	2011
Pendapatan Usaha	19		
Pendapatan Usaha		43.790.200,00	27.715.742,00
Jumlah		43.790.200,00	27.715.742,00
Beban Usaha	20		
Beban Adm. Dan Umum		3.170.700,00	6.282.992,00
Beban Pyst. Aset Tetap		6.837.500,00	-
Jumlah		10.008.200,00	6.282.992,00
SHU Tahun Berjalan		33.782.000,00	21.432.750,00

Laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah terdiri dari pendapatan dan biaya. Pendapatan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah diperoleh dari pendapatan jasa. Pendapatan dalam laporan perhitungan hasil usaha Pendapatan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah tidak dibedakan antara pendapatan jasa dari anggota dan non anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha Pendapatan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah dapat dilihat pada lampiran. Analisa terhadap laporan hasil usaha akan memberikan gambaran tentang perkembangan usaha perusahaan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas diuraikan menjadi tiga bagian:⁸¹

- a. Arus kas aktivitas operasional
- b. Arus kas aktivitas pendanaan

Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah

Gambar 4.3

Laporan Arus Kas

Periode 31 Desember 2012-2013

	2013	2012
ARUS KAS DARI OPERASIONAL		
SHU tahun berjalan	42.894.535,00	33.782.000,00
Penyesuaian		
Piutang anggota	(176.700.000,00)	(118.073.500,00)
Persediaan barang	(22.353.035,00)	13.704.100,00
Pyst. Persediaan barang	9.175.000,00	6.837.500,00
Jumlah	(189.878.035,00)	(97.531.900,00)
Jumlah kas operasional	(146.983.500,00)	(63.749.900,00)
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Peralatan kantor	(9.350.000,00)	(1.500.000,00)
Hutang usaha	74.000.000,00	40.000.000,00
Hutang anggota	40.000.000,00	-
Simpanan sukarela	3.187.156,00	1.139.847,00
Dana-dana SHU	3.010.000,00	(86.000,00)
Hutang bank BMI/Al Falah	-	40.000.000,00
Simpanan pokok	1.050.000,00	600.000,00
Simpanan wajib	92.000.000,00	68.581.000,00
Cadangan koperasi	16.952.500,00	8.373.500,00
SHU tahun lalu	(33.782.000,00)	(21.432.750,00)
Jumlah	187.067.656,00	135.675.597,00
Perubahan kas dari kas ekuivalen	40.084.156,00	71.925.697,00

⁸¹Dokumentasi, *Laporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah*, hlm. 03

Kas dan setara kas pada awal periode	110.662.655,37	38.736.958,37
Kas dan setara kas pada akhir periode	150.746.811,37	110.662.655,37

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas diuraikan menjadi dua bagian:

- a. Penambahan, dan
- b. Pengurangan.⁸²

Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah

Gambar 4.4

Laporan Perubahan Ekuitas

Periode 31 Desember 2012

	2012
Saldo Awal Ekuitas	151.125.250,00
Penambahan	
SHU Tahun Berjalan	33.782.000,00
Simpanan Pokok	600.000,00
Simpanan Wajib	68.581.000,00
Cadangan Koperasi	8.373.500,00
Jumlah	111.336.500,00
Pengurangan	
Pembagian SHU Tahun Lalu	(21.432.750,00)
Jumlah	(21.432.750,00)
Jumlah Penambahan/(Pengurangan)	89.903.750,00
Saldo Akhir Ekuitas	241.029.000,00

⁸² *Ibid.*,

B. LAPORAN KEUANGAN YANG SEHARUSNYA DIBUAT JIKA SESUAI DENGAN PSAK SYARIAH NO. 101

Laporan keuangan yang seharusnya dibuat jika sesuai dengan PSAK Syariah No. 101 dapat dilihat pada Gambar 4.8. Entitas Syariah dalam hal ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah pada neraca menyajikan aset lancar dimana menurut PSAK Syariah No. 101 yang dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila aset tersebut: a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah atau; b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau; c) berupa kas dan setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar yang ada pada Koperasi Pondok Pesantren berupa kas yang berupa kas dan berupa simpanan yang disimpan di bank.⁸³

Dalam neraca berdasarkan ketentuan juga menyajikan aset ijarah dimana menurut PSAK No. 107 Akuntansi Ijarah, aset ijarah merupakan aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Objek ijarah bisa berupa aset berwujud atau tidak berwujud. dalam laporan keuangan Koperasi Pondok Pesantren tidak memiliki ijarah baik secara berwujud maupun tidak berwujud. Dalam neraca juga menyajikan aset tetap yang menurut Expose Draft PSAK 16 Aset Tetap , aset tetap merupakan

⁸³ Siti Badiah, Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis PSAK Syariah No. 101 (Studi Interpretif pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja), (Indonesia: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2015), (Diakses, 09 Oktober 2016)

aset berwujud yang a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan ; b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam laporan keuangan ini yang termasuk aset tetap adalah bangunan yang telah direvaluasi dan peralatan untuk administrasi.

Menurut PSAK Syariah No. 101 kewajiban dibedakan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal entitas syariah atau; b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran pengelolaan investasinya; b) mudharabah muqayadah yaitu mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi; c) mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah

dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Pada neraca juga menggambarkan modal dimana modal ini didapat dari zakat, infaq, dan sedekah.⁸⁴

Gambar 4.5

Neraca Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah sesuai PSAK Syariah No. 101

Periode 31 Desember 2012

Aset Lancar	
Kas Setara Kas	110.662.655,37
Piutang Anggota	314.191.000,00
Persediaan Barang	341.997.027,00
Jumlah	766.850.682,37
Aset Ijarah	
Kendaraan	-
Mesin Jahit	-
Jumlah	-
Aset Tetap	
Bangunan Kantor	48.000.000,00
Peralatan Kantor	17.750.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.837.500,00)
Jumlah	58.912.500,00
Jumlah Aset Tidak Lancar	58.912.500,00
Jumlah Aset	825.763.182,37
Kewajiban Lancar	
Simpanan Sukarela	1.139.847,00
Dana-Dana SHU	4.232.500,00
Hutang Salam	189.361.835,37
Jumlah	194.734.182,37

⁸⁴ Siti Badiah, Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis PSAK Syariah No. 101 (Studi Interpretif pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja), (Indonesia: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2015), (Diakses, 09 Oktober 2016)

Kewajiban Jangka Panjang	
Hutang Dana Bergulir	350.000.000,00
Hutang BMI/ Al Falah	40.000.000,00
Jumlah	390.000.000,00
Dana Syirkah Temporer	
Dana Syirkah Temporer dari bank:	-
Tabungan Mudharabah	-
Jumlah	-
Ekuitas	
Simpanan Pokok	3.880.000,00
Simpanan Wajib	106.017.000,00
Cadangan Koperasi	97.350.000,00
SHU Tahun Berjalan	33.782.000,00
Jumlah	241.029.000,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	825.763.182,37

Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah pada Perhitungan Hasil Usaha menyajikan Laporan Laba Rugi dimana menurut PSAK Syariah No. 101 yang dapat diklasifikasikan sebagai; pendapatan usaha, pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib atau pihak koperasi menyimpan di bank, beban usaha, SHU tahun berjalan, pendapatan dan beban usaha, laba sebelum pajak, dan penghasilan neto.

Gambar 4.6

Perhitungan Hasil Usaha Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah dibuat sesuai dengan

Laporan Laba Rugi PSAK Syariah No. 101

Periode 31 Desember 2012

Pendapatan Usaha	
Pendapatan Usaha	43.790.200,00
Jumlah	43.790.200,00

Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	
Pendapatan dari sewa	
Pendapatan Neto Ijarah	-
Pendapatan dari Bagi Hasil	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	-
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	-
Jumlah	-
Beban Usaha	
Beban Administrasi dan Umum	(3.170.700,00)
Beban Penyusutan Aset tetap	(6.837.500,00)
Jumlah	10.008.200,00
SHU Tahun Berjalan	33.782.000,00
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Penghasilan Nonusaha	-
Beban Nonusaha	-
Jumlah	-
Laba Sebelum Pajak	
Beban Pajak Penghasilan	(-)
Penghasilan Neto	
Penghasilan neto yang dapat diantribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	-
Kepentingan nonpengendalian	-

Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah pada Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dimana menurut PSAK Syariah No. 101 yang dapat diklasifikasikan sebagai; arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

Gambar 4.7

Laporan Arus Kas Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah sesuai

PSAK Syariah No. 101 Periode 31 Desember 2012

	2013	2012
ARUS KAS DARI OPERASIONAL		
SHU tahun berjalan	42.894.535,00	33.782.000,00
Penyesuaian		
Piutang anggota	(176.700.000,00)	(118.073.500,00)
Persediaan barang	(22.353.035,00)	13.704.100,00
Pyst. Persediaan barang	9.175.000,00	6.837.500,00
Jumlah	(189.878.035,00)	(97.531.900,00)
Jumlah kas operasional	(146.983.500,00)	(63.749.900,00)
Investasi		
Simpanan wajib	-	-
Jumlah investasi	-	-
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Peralatan kantor	(9.350.000,00)	(1.500.000,00)
Hutang usaha	74.000.000,00	40.000.000,00
Hutang anggota	40.000.000,00	-
Simpanan sukarela	3.187.156,00	1.139.847,00
Dana-dana SHU	3.010.000,00	(86.000,00)
Hutang bank BMI/Al Falah	-	40.000.000,00
Simpanan pokok	1.050.000,00	600.000,00
Simpanan wajib	92.000.000,00	68.581.000,00
Cadangan koperasi	16.952.500,00	8.373.500,00
SHU tahun lalu	(33.782.000,00)	(21.432.750,00)
Jumlah	187.067.656,00	135.675.597,00
Perubahan kas dari kas ekuivalen	40.084.156,00	71.925.697,00
Kas dan setara kas pada awal periode	110.662.655,37	38.736.958,37
Kas dan setara kas pada akhir periode	150.746.811,37	110.662.655,37

Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah pada Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan laporan dimana menurut PSAK Syariah No. 101 yang dapat diklasifikasikan sebagai penambahan dan pengurangan.

Gambar 4.8

Laporan Perubahan Ekuitas Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah sesuai

PSAK Syariah No. 101 Periode 31 Desember 2012

	2012
Saldo Awal Ekuitas	151.125.250,00
Penambahan	
SHU Tahun Berjalan	33.782.000,00
Simpanan Pokok	600.000,00
Simpanan Wajib	68.581.000,00
Cadangan Koperasi	8.373.500,00
Jumlah	111.336.500,00
Penerimaan Pelunasan Piutang	
Pendapatan Sewa	-
Jumlah	-
Penerimaan Piutang Bagi Hasil	
Pembiayaan Mudharabah	-
Pembiayaan Musyarakah	-
jumlah	-
Pengurangan	
Pembagian SHU Tahun Lalu	(21.432.750,00)
Pendapatan Sewa	(-)
Jumlah	(21.432.750,00)
Jumlah Penambahan/(Pengurangan)	89.903.750,00
Saldo Akhir Ekuitas	241.029.000,00

C. PEMBAHASAN

Sub bab ini merupakan hasil keseluruhan dari seluruh analisis yang dilakukan sebelumnya. Seperti telah disebutkan di atas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, maka laporan keuangan harus relevan dan andal agar bermanfaat bagi penggunanya. Secara keseluruhan laporan keuangan koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan laba rugi menggambarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh suatu perusahaan. Laporan arus kas menggambarkan operasional perusahaan.

Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah juga mempunyai laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah berbadan hukum koperasi dan belum mengacu kepada PSAK No. 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah.

Neraca dalam laporan keuangan Koperasi al-Ittifaqiah tidak sesuai pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Neraca pada koperasi tersebut terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas yang merupakan modal koperasi yang terdiri dari simpanan-simpanan. Neraca merupakan laporan pertanggungjawaban dewan manajemen kepada anggota. Secara

keseluruhan neraca tersebut berguna bagi anggota, pengurus, dewan pengawas, badan manajemen dan calon anggota. Neraca pada PSAK No. 101 terdiri dari aktiva, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas.

Laporan laba rugi Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah adalah laporan perhitungan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha tidak sesuai pada PSAK No. 101. Laporan perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban dan laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib, pendapatan usaha, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban nonusaha, laba sebelum pajak, dan penghasilan neto.

Laporan arus kas harus dimiliki oleh setiap perusahaan, karena laporan ini menggambarkan aktivitas kas pada periode tertentu. Laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah dapat dikatakan mengacu pada PSAK No.101. Laporan arus kas secara umum terdiri dari arus kas dari aktivitas operasional, kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

Pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah masih sangat sederhana atau tradisional, serta kurangnya pengetahuan bagi pengelola mengenai penyusunan laporan keuangan yang seharusnya dipakai, kurangnya informasi sehingga menggunakan metode sederhana dan kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja ahli bidang akuntansi. Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa koperasi

pondok pesantren al-Ittifaqiah belum menerapkan PSAK Syariah No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang seharusnya sebagai pedoman bagi koperasi pondok pesantren yang selayaknya di terapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pencatatan laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Pondok Pesantren selama ini masih sangat sederhana atau tradisional dan masih menggunakan berbasis konvensional. Selama ini pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah masih belum sesuai atau mengacu pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan koperasi karena pada dasarnya Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah masih berbadan hukum koperasi.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terbentuknya penerapan PSAK yaitu kurangnya pengetahuan Koperasi Pondok Pesantren, Pengelolaan koperasi belum memiliki sumber daya manusia di ahli bidang, adanya pandangan bahwa pencatatan yang dibuat selama ini mudah dipahami meskipun tidak sesuai dengan PSAK No. 101.

B. Saran

1. Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah adalah salah satu lembaga keuangan koperasi yang berbasis koperasi yang sudah cukup lama berdiri dan bisa diandalkan dalam memajukan

penerapan koperasi yang lebih luas dengan potensi tingkat akuntansi yang tinggi, untuk itu lembaga keuangan tersebut harus mau menjalin kerjasama yang baik dengan pihak manapun tanpa terkecuali untuk tujuan yang sama.

2. Dengan adanya penelitian ini, semoga Koperasi Pondok Pesantren al-Ittifaqiah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan sesuai dengan operasional bisnis islam yang diteruskan dari tahun ketahun.